



PUTUSAN
Nomor 322 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GOMUSTANG SIMBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gelong Baru Selatan III/28, RT 004 RW 001, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ajun Komisaris Besar Polisi Aminullah, S.H., jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Metro Jaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar kerancuan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat kami mengajukan gugatan agar Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Komisi Informasi Pusat membatalkan Keputusan tersebut dan agar memberikan keputusan yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT., tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 09 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 09 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon/Permohonan Kasasi seluruhnya;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan lampiran/*copy* dari persidangan kode etik Propam Polda Metro Jaya dengan putusan Nomor PUT/50/XI/2016/KKEP tertanggal 02 November 2016, atas terperiksa Ipda Sonar Sihaloho, S.H., M.H., kepada Pemohon, sebagai *novum* untuk memenuhi kebutuhan Pemohon melakukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI;
4. Membatalkan pembayaran yang sudah Pemohon lakukan atas hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp374.000,00. Ditambah biaya lain yang dibebankan pada Pemohon, yaitu biaya perkara (pada waktu Pemohon mendaftarkan permohonan banding di PTUN Jakarta), sebanyak Rp457.000,00 dan biaya salinan putusan pengadilan sebanyak Rp40.000,00 yang jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp988.000,00. Suatu

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang sangat besar bagi Pemohon pada saat tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan, ditambah situasi yang berat akibat pandemi *Covid 19*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga apabila dihitung sejak pengucapan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan Salinannya yang telah terbuka untuk umum sejak tanggal 12 November 2020, maka pengajuan permohonan keberatan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GOMUSTANG SIMBOLON**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/KI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/KI/2021